

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. Marwah Yusuf (2021)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh aparatur desa yang berada di 13 desa Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepalah urusan pemerintah, dan kepala urusan pembangunan. Teknik untuk pengambilan sampel adalah sampling jenuh sehingga jumlah sampelnya sebanyak 65 orang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dan pengambilan data dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada objek yang diteliti. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas individu. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pencegahan *fraud* dana desa.

Hasil yang diperoleh (Marwah Yusuf 2021) dalam penelitian terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel yang ada yaitu kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dana desa pada pemerintahan Kecamatan Adonara Tengah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan sama dengan penelitian sekarang yaitu kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal dan moralitas Individu.
- b. Variabel dependen yang digunakan adalah pencegahan *fraud*.
- c. Metode pemilihan sampel yaitu menggunakan metode *purposive sampling*.

Terdapat pula perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada:

- a. Peneliti sebelumnya menggunakan SPSS sedangkan penelitian sekarang menggunakan smartPLS.
- b. Penelitian sebelumnya pada desa yang berada di Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur, sedangkan penelitian sekarang pada desa yang berada di Kecamatan Paciran.

2. Armelia & Wahyuni (2020)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatatur desa, efektivitas pengendalian internal, dan moral *sensitivity* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Populasi dari penelitian ini

adalah pemerintah desa yang mememanajemenkeuangan tingkat desa Kecamatan Banjar sebanyak 17 desa. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu kepala desa, bendahara desa serta ketua BPD (Badan Pengurus Daerah). Teknik untuk pengambilan sampel adalah *purposive sampling* sehingga jumlah sampelnya sebanyak 52 orang. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan penyajian data dibantu dengan program SPSS 22. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyebarkan kuesioner secara langsung ke lapangan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen kompetensi aparatur, efektivitas pengendalian internal, dan moral *sensitify*. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pencegahan *furad*.

Hasil yang diperoleh (Armelia & Wahyuni 2020) dalam penelitian bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, efektivitas pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, dan moral *sensitivity* berpengaruh secara positif dan signifikansi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bajar Kabupaten Buleleng.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan sama dengan penelitian sekarang yaitu kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan moralitas
- b. Model pemilihan sampel yaitu menggunakan metode *purposive sampling*.

Terdapat pula perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada:

- c. Penelitian sebelumnya menggunakan SPSS sedangkan penelitian sekarang menggunakan smartPLS.
- d. Penelitian sebelumnya pada desa yang berada di Kecamatan Bajar Kabupaten Buleleng., sedangkan penelitian sekarang pada desa yang berada di Kecamatan Paciran.

3. Romadaniati, Taufeni Taufik (2020)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh kompetensi aparatur desa, system pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap terhadap *fraud* yang terjadi pada pemerintahan dengan menggunakan variabel moderasi moralitas individu. Populasi dari penelitian ini adalah desa yang berada di Kabupaten Bengkalis berjumlah 136 Desa. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan. Teknik untuk pengambilan sampel adalah menggunakan *Purposive Sampling* sehingga jumlah sampelnya 306 orang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data prime, yang merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system*, serta variabel moderasi moralitas individu. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kecenderungan *Fraud*.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian (Romadaniati, Taufeni Taufik, 2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Moralitas individu memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*, moralitas individu memperkuat sistem pengendalian internal terhadap pengaruh *fraud*, dan moralitas individu memperkuat pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan sama dengan penelitian sekarang yaitu kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal.
- b. Variabel dependen yang digunakan adalah pencegahan *fraud*.
- c. Metode pemilihan sampel yaitu menggunakan metode *purposive sampling*.

Terdapat pula perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian sebelumnya menggunakan *whistleblowing system* sebagai variabel independen, sedangkan penelitian sekarang tidak.
- b. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel moderasi moralitas individu, sedangkan peneliti sekarang menggunakan moralitas individu sebagai variabel independen.
- c. Penelitian sebelumnya menggunakan SPSS sedangkan penelitian sekarang menggunakan smartPLS.

- d. Penelitian sebelumnya pada desa yang berada di Kabupaten Bengkalis, sedangkan penelitian sekarang pada desa yang berada di Kecamatan Paciran.

4. Faridatul (2020)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal dan whistleblowing terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana. Populasi dari penelitian ini adalah pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu, dan Desa Patokpicis di Kecamatan Wajak. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh aparatur desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) sebanyak 99 responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer yang didapat dari hasil penyebaran kuesioner. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen yaitu kompetensi aparatur, moralitas, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing*. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Hasil yang diperoleh (Faridatul, 2020) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap pencegahan *farud* dalam pengelolaan dana desa. Secara parsial kompetenis aparatur, moralitas, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing* memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan sama dengan penelitian sekarang yaitu kompetensi aparatur des, sistem pengendalian internal dan moralitas.
- b. Variabel dependen yang digunakan adalah pencegahan *fraud*.
- c. Metode pemilihan sampel yaitu menggunakan metode *purposive sampling*.

Terdapat pula perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian sebelumnya menggunakan *whistleblowing* sebagai variabel independen, sedangkan penelitian sekarang tidak.
- b. Penelitian sebelumnya menggunakan SPSS sedangkan penelitian sekarang menggunakan smartPLS
- c. Penelitian sebelumnya pada desa yang berada di Kecamatan Wajak, sedangkan penelitian sekarang pada desa yang berada di Kecamatan Paciran.

5. Widjajanti (2019)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hasil dari pengaruh moralitas aparat dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan studi empirisnya di Pemerintah Kota Surabaya. Populasi dari penelitian ini adalah generasi yang memiliki karakter objek atau subjek yang memiliki kualitas serta karakter yang telah ditetapkan oleh peneliti sehingga dapat dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel yang digunakan pada

penelitian ini yaitu 27 satuan kerja perangkat daerah yang berada di Kota Surabaya, sekretaris daerah terdiri 10 kantor, badan perencanaan pembangunan, inspektorat, satpol PP, 18 kantor dinas, 10 lembaga teknis, dan 31 kecamatan. Teknik untuk pengambilan sampel adalah total sampling. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi berganda dengan bantuan SPSS 16. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen yaitu moralitas aparat (X1) dan asimetri informasi (X2). Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecenderungan kecurangan akuntansi (Y).

Hasil yang diperoleh (Widjajanti, 2019) dalam penelitian menjeaskan bahwa moralitas aparatur dan asimetris informasi secara simulant bahwa berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan moralitas aaparatur berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pencegahan kecenderungan kecurangan akuntansi..

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Penelitian sebelumnya dan sekarang sama-sama menggunakan moralitas kompetensi aparat sebagai variabel independen.
- b. Variabel dependen yang digunakan adalah pencegahan *fraud*.

Terdapat pula perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian sebelumnya menggunakan asimetri informasi sebagai variabel independen, sedangkan penelitian sekarang menggunakan sistem pengendalian internal
- b. Penelitian sebelumnya menggunakan SPSS sedangkan penelitian sekarang menggunakan smartPLS.
- c. Penelitian sekarang menggunakan metode pemilihan sampel yaitu metode *purposive sampling*, sedangkan penelitian sebelumnya tidak menggunakan metode tersebut.
- d. Penelitian sebelumnya pada desa yang berada di Kota Surabaya, sedangkan penelitian sekarang pada desa yang berada di Kecamatan Paciran.

6. Luh Ayu Marsita Dewi (2019)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji internal *locus of control* dalam memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal pada pencegahan *fraud*. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kantor desa Kota Denpasar berjumlah 27 desa. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan keuangan. Teknik untuk pengambilan sampel adalah metode sampel jenuh sehingga jumlah sampelnya sebesar sebanyak 81 responded. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa informasi yang dikumpulkan berdasarkan jawaban responden pada kuesioner. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan variabel moderasi internal

lous of control. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pencegahan *fraud*.

Hasil yang diperoleh (Luh Ayu Marsita Dewi, 2019) dalam penelitian ditemukan internal *locus of control* mampu memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa dan juga sistem pengendalian internal pada pencegahan *fraud* yang dalam hal ini adalah pengelolaan dana desa. Sehingga disarankan agar pemeritahan desa selalu mempertimbangkan kendali diri aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan sama dengan penelitian sekarang yaitu kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal.
- b. Variabel dependen yang digunakan adalah pencegahan *fraud*.

Terdapat pula perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian sekarang menggunakan moralitas individu sebagai variabel independen.
- b. Penelitian sebelumnya menggunakan internal *lous of control* sebagai variabel moderasi, sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel moderas.
- c. Penelitian sebelumnya menggunakan SPSS sedangkan penelitian sekarang menggunakan smartPLS

- d. Penelitian sebelumnya menggunakan metode sampel jenuh sebagai metode pemilihan sampel, sedangkan penelitian sekarang menggunakan *metode purposive system*.
- e. Penelitian sebelumnya pada desa yang berada di Kota Denpasar, sedangkan penelitian sekarang pada desa yang berada di Kecamatan Paciran.

7. Rahayu, Rahmayati, and Narulitasari (2019)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur pemerintahan desa, sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa. Populasi dari penelitian ini adalah desa yang berada di Kecamatan Polanharjo, Klaten berjumlah 18 desa. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu kepala desa, sekertaris desa, dan bendahara desa. Teknik untuk pengambilan sampel adalah menggunakan *purposive sampling* sehingga jumlah sampelnya 52 responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan mengolah data menggunakan SPSS 20. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pencegahan *fraud*.

Hasil yang diperoleh dari (D. Rahayu et al., 2019) penelitian ini adalah kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa, sedangkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan sama dengan penelitian sekarang yaitu kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal.
- b. Variabel dependen yang digunakan adalah pencegahan *fraud*.
- c. Metode pemilihan sampel yaitu menggunakan metode *purposive sampling*.

Terdapat pula perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian sebelumnya menggunakan SPSS sedangkan penelitian sekarang menggunakan smartPLS.
- b. Penelitian sebelumnya pada desa yang berada di Kecamatan Polanharjo, sedangkan penelitian sekarang pada desa yang berada di Kecamatan Paciran.

8. Klara Wonar, Dr. Syaikhul Falah., (2018)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan pencegahan *fraud* dengan moral *sensitivity* sebagai variabel moderasi. Populasi dari penelitian ini adalah desa-desa yang menerima dana desa di Wilayah Biak Utara berjumlah 61 desa. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Pendamping Desa. Teknik untuk pengambilan sampel adalah *purposive sampling* sehingga jumlah sampelnya sebanyak 183 orang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan moral sensitivity sebagai moderasi. Sedangkan variabel dependen yaitu pencegahan *fraud*.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian (Klara Wonar, Dr. Syaikhul Falah, 2018) penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa mempengaruhi pencegahan *fraud*, kepatuhan pelaporan keuangan mempengaruhi pencegahan *fraud*, dan sementara itu sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi pencegahan *fraud*. Lebih jauh, kepekaan moral tidak memoderasi kompetensi aparatur desa, ketaatan terhadap pelaporan keuangan dan pengendalian internal sistem.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan sama dengan penelitian sekarang yaitu kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal.
- b. Variabel dependen yang digunakan adalah pencegahan *fraud*
- c. Metode pemilihan sampel yaitu menggunakan metode *purposive sampling*.
- d. Penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang menggunakan smartPLS

Adapun perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yaitu terletak pada:

- a. Penelitian sebelumnya menggunakan ketaatan pelaporan keuangan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian sekarang tidak.
- b. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel moderasi.
- c. Penelitian sebelumnya pada desa yang berada di Wilaya Biak Utara, sedangkan penelitian sekarang pada desa yang berada di Kecamatan Paciran.

9. Nurul Huda (2018)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, dan sistem pengadaan barang/jasa terhadap pencegahan kecurangan pada panitia pengadaan barang/jasa Provinsi DKI Jakarta. Populasi dari penelitian ini adalah panitia pengadaan barang/jasa Provinsi DKI Jakarta. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh pegawai badan pelayanan pengadaan barang dan jasa Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab terhadap proses pengadaman barang/jasa pemerintah. Teknik untuk pengambilan sampel adalah menggunakan metode sensus sehingga jumlah sampelnya sebanyak 123 kuesioner. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui survey dengan menggunakan daftar pernyataan (kuesioner). Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen yaitu kompetensi, sistem pengendalian internal, dan sertifikasi pengadaan barang/jasa. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pencegahan fraud.

Hasil yang diperoleh (Huda et al., 2018) dalam penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan sertifikasi pengadaan barang/jasa yang

berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan kompetensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kompetensi, sistem pengendalian internal, dan sertifikasi pengadaan barang/jasa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan sama dengan penelitian sekarang yaitu kompetensi dan sistem pengendalian internal.
- b. Variabel dependen yang digunakan adalah pencegahan *fraud*.

Terdapat pula perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian sebelumnya menggunakan sertifikasi pengadaan barang/jasa sebagai variabel independen.
- b. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel moderasi.
- c. Penelitian sekarang menggunakan metode *purposive sampling* sebagai metode pemilihan sampel, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode survei.
- d. Penelitian sebelumnya menggunakan SPSS sedangkan penelitian sekarang menggunakan smartPLS.

- e. Penelitian sebelumnya pada desa yang berada di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan penelitian sekarang pada desa yang berada di Kecamatan Paciran.

10. Endang Sri Wahyuni (2018)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji analisis *whistleblowing system* dan kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam suatu organisasi perangkat desa Kabupaten Bengkalis. Populasi dari penelitian ini adalah perangkat satuan kerja perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bengkalis dengan jumlah 33 SOPD. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai kepala dinas, kasubbag keuangan, dan bendahara pengeluaran.

Teknik untuk pengambilan sampel adalah menggunakan *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan dan kuesioner yang disebar. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen yaitu analisis *whistleblowing system* dan kompetensi aparatur. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pencegahan *fraud*.

Hasil yang diperoleh (Wahyuni & Nova, 2019) dalam penelitian diperoleh bahwa *whistleblowing system* dan kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkalis.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan sama dengan penelitian sekarang yaitu kompetensi aparatur.
- b. Variabel dependen yang digunakan adalah pencegahan *fraud*.
- c. Metode pemilihan sampel yaitu menggunakan metode *purposive sampling*.

Terdapat pula perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian sebelumnya menggunakan *whistleblowing system* sebagai variabel independen, sedangkan penelitian sekarang tidak.
- b. Penelitian sekarang menggunakan variabel independen sistem pengendalian internal dan moralitas individu.
- c. Penelitian sebelumnya menggunakan SPSS sedangkan penelitian sekarang menggunakan smartPLS.
- d. Penelitian sebelumnya pada desa yang berada di Kabupaten Bengkalis, sedangkan penelitian sekarang pada desa yang berada di Kecamatan Paciran.

11. (Atmadj, 2017)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji kembali pengaruh dari variabel kompetensi aparatur desa dan variabel pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa dengan moralitas sebagai variabel moderasi. Populasi dari penelitian ini adalah kepala desa yang desanya telah menerima dana desa di Kabupaten Buleleng dengan jumlah desa 129. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu kepala desa yang sesuai dengan kriteria. Teknik untuk pengambilan sampel adalah menggunakan teknik

pengumpulan kuesioner secara personal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen yaitu kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal, serta moralitas sebagai variabel moderasi. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pencegahan *fraud*.

Hasil yang diperoleh (Atmadj, 2017) dalam penelitian menuntukah bahwa kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, serta moralitas terbukti sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan penelitian sebelumnya dan sekarang sama-sama menggunakan kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal.
- b. Variabel dependen penelitian sebelumnya dan sekarang sama yaitu pencegahan *fraud*.

Terdapat pula perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada:

- a. Peneliti sebelumnya menggunakan variabel moderasi sedangkan penelitian sekarang tidak.

- b. Penelitian sebelumnya pada desa yang berada di Kabupaten Buleleng, sedangkan penelitian sekarang pada desa yang berada di Kecamatan Paciran.

2.2 Matriks Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas, maka matriks penelitian terdahulu yang dapat dibuat ialah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Pencegahan Fraud		
		KA	SPI	MI
1	(Marwah Yusuf, aswar, 2021)	S	S	S
2	(Armelia & Wahyuni, 2020)	TS	S	S
3	(Romadaniati, Taufeni Taufik, 2020)	S	S	S
4	(Faridatul, 2020)	S	S	S
5	(Widjajanti, 2019)	S	-	S
6	(Luh Ayu Marsita Dewi, 2019)	S	S	-
7	(D. Rahayu et al., 2019)	S	TS	-
8	(Klara Wonar, 2018)	S	TS	-
9	(Huda et al., 2018)	TS	S	-
10	(Endang sri wahyuni, 2018)	S	-	-
11	(Atmadj, 2017)	S	S	S

Sumber: Data Diolah

2.3 Landasan Teori

2.3.1 *New Fraud Triangle Theory*

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Dr. Donald Cressey dengan menyampaikan suatu model klasik untuk menjelaskan perilaku *fraud* dalam

hubungan kerja, peneliti juga menerbitkan buku berjudul *People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement* dengan hipotesis terakhir yaitu: orang yang dipercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika ia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai banyak masalah yang tidak mungkin dapat diceritakan kepada orang lain, orang tersebut secara diam-diam mengatasi masalah keuangannya dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemegang kepercayaan dibidang keuangan. Dari Cressey ini menyampaikan bahwa banyak dari pelanggar kepercayaan ini telah mengetahui bahwa yang mereka lakukan merupakan tindakan illegal, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah hal yang wajar.

Cressey mengungkapkan bahwa ada tiga faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan fraud, ialah masalah keuangan yang harus dirahasisakan, adanya kesempatan untuk melakukan fraud, dan rasionalisasi dari pelaku sendiri. Dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor tersebut yang akhirnya dikenal dengan *Fraud Triangle Theory*. Unsur-unsur fraud triangle theory sebagai berikut:

a. Pressure (tekanan)

Cressey mengatakan bahwa terjadinya perilaku tindakan kecurangan bermula pada terjadinya tekanan yang menghimpitnya, pelaku tersebut mempunyai kebutuhan khusus untuk yaitu keuangan yang mendesak, tidak diungkapkan kepada orang lain. Point yang penting dalam kasus ini adalah terjadinya tekanan yang menghimpit hidupnya yang tidak diungkapkan kepada orang lain.

Menurut SAS No. 99, manajer ataupun karyawan lain memiliki inisiatif atau berada dibawah tekanan yang memberikan alasan untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Kondisi yang umum terjadi pada *pressure* yang dapat mengakibatkan kecurangan antara lain: financial stability, external pressure, personal financial need, dan financial targets. (Gultom & Safrida, 2020) menyatakan *pressure* berawal dari adanya tekanan yang terjadi lebih penting dari pada etika pribadi atau kebutuhan.

b. *Opportunity* (kesempatan)

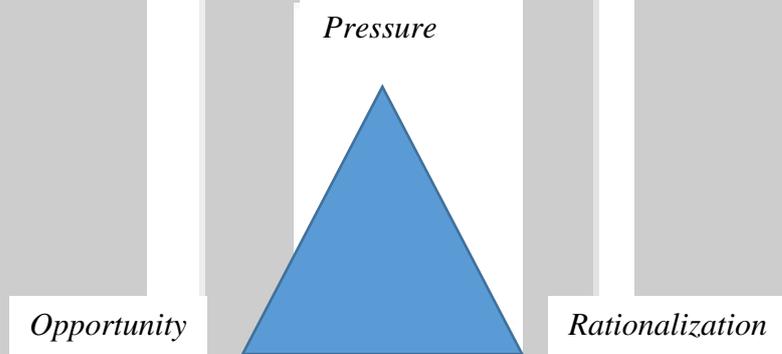
Perilaku kecurangan memiliki persepsi bahwa ada pekuang baginya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain. Cressey berpendapat bahwa ada dua komponen dari presepsi tentang peluang. Pertama, *general informasi* yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung kepercayaan dapat dilanggar tanpa kosekuensi. Pengetahuan ini dapat diperoleh dari apa yang ia lihat ataupun di dengar. Kedua, *technical skill* atau keahlian/keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kecurangan tersebut.

Menurut SAS No. 99, lingkungan diman ketiadaan pengendalia, pengendalian tidak efektif, atau kempuan manajemen untuk mengabaikan pengendalian yang menyediakan kesempatan atau peluang untuk *fraud* terjadi. (Singleton & Singleton, 2010) merujuk penelitian Cressey menyatakan bahwa perilaku *fraud* selalu memiliki pengetahuan dan kesempatan melakukan *fraud*. Karyawan dan manajer yang telah ada selama bertahun-tahun mengetahui cukup baik dimana kelemahan dalam pengendalianinternal dan telah mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana untuk melakukan kejahatan dengan

sukses. Tetapi kunci utama dalam opportunity ini adalah pengendalian internal dimana kelemahan dalam pengendalian internal atau tidak adanya pengendalian internal memberika kesempatan bagi pelaku *fraud* untuk melakukan kejahatan.

c. *Rationalization* (rasionalisasi)

Menurut SAS No. 99, rasionalisasi disini menyangkut adanya sikap, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai lain untuk melakukan tindakan yang tidak jujur. Menurut (Singleton & Singleton, 2010) menyatakan rasionalisasi yang paling banyak digunakan misalnya meminjam uang, mengambil barang hanya untuk perlakuan yang adil, mengambil dana atau asset untuk tujuan sosial. Rasioanlisasi sebagai pemikiran yang menjuatifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat normal. Skema fraud diamond theory ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Fraud Theory

Pada tahun 2004 muncul teori *fraud diamond* yang merupakan penyempurnaan teori *fraud triangle* dengan menambahkan elemen keempat yaitu *capability* (kemampuan) sebagai salah satu sebab seseorang melakukan *fraud*. Menurut (Wolfe & Hermanson, 2004) menyatakan bahwa meskipun kecurangan

(*fraud*) dikarnakan oleh keadaan dalam tekanan, kesempatan, dan rationalisasi namun seseorang tidak dapat melakukan *fraud* jika ia tidak memiliki kapabitan serta kemampuan. Sehingga munculnya teori *fraud diamond*. Elemen-elemen secara keseluruhan dari *fraud diamond theory* sebagai berikut:

- a. *Pressure* (adanya tekanan untuk melakukan *fraud*)
- b. *Opportunity* (terdapat suatu kelemahan dalam sistem dimana seseorang dapat menheksploitasinya sehingga *fraud* terjadi)
- c. *Rationalization* (adanya keyakinan pada diri bahwa perilaku kecurangan bernilai resika)
- d. *Capability* (kemampuan yang diperlukan untuk menjadi orang yang tepat dalam melakukan kecurangan)

Sifat-sifat terkait elemen kapabilitas yang sangat penting dalam pribadi perilaku kecurangan sebagai berikut:

1. Position/function (posisi/jabatan)

Posisi atau fungsi seseorang dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk menciptakan atau memanfaatkan kesempatan untuk *fraud* yang tidak tersedia untuk orang lain. Ketika seseorang melakukan fungsi tertentu secara terus menerus maka kemampuannya untuk melakukan *fraud* mengingat sebagaimana pengetahuannya terhadap proses dan pengendalian fungsi dalam organisasi yang berkembang sepanjang waktu.

2. *Brains* (kecerdasan)

Pelaku kecurangan cukup *smart* untuk memahami dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan kedudukan, fungsi atau kewenangan akses untuk keuntungan twrbesat.

3. *Confidence/ego* (kepercayaan diri/ego)

Pelaku kecurangan memiliki ego yang kuat dan percaya diri yang besar bahwa dia tidak akan terdeteksi ataupun orang yakin bahwa dia akan mudah keluar dari kesulitan jika ditangkap.

4. *Coerciom skills* (kemampuan untuk memaksa)

Pelaku kecurangan yang berhasil dapat memaksa orang lain dapat melakukan ataupun menyembunyikan penipuan. Seseorang dengan personalitasnya yang sangat persuatif mungkin dapat menyakinkan orang lain untuk ikut serta dalam suatu *fraud*.

5. *Effective lying* (keefektifan berbohong)

Penipuan yang sukses berbohong secara efektif dan konsisten. Hal yang dilakukan untuk menghindari hal tersebut, individu harus mampu menatap auditor, investor, dan pihak lainnya untuk berbohong dengan meyakinkan jalan cerita kebohongan yang konsisten.

6. *Immunity to stress* (kekebalan terhadap tekanan)

Individu harus mengendalikan stress karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi melewati suatu priode yang dapat menimbulkan stress.

Perkembangan teori selanjutnya ialah The New Fraud Triangle Modal yang di kemukaaan oleh (Kassem & Higson, 2012) menyampaikan bahwa semua teori

fraud sebelumnya merupakan perluasan dari teori fraud triangle Cressey dan harus diintegrasikan dalam satu model itu termasuk motivasi, kesempatan, integritas, dan kemampuan.

2.3.2 Teory Kohlberg

Lawrence Kohlberg (Miller, 1982) mengarahkan fokus pandangannya pada penalaran moral yang merupakan dasar dari setiap perilaku etis yang dilakukan oleh masing-masing individu. Kohlberg berasumsi bahwa suatu kematangan moral datang dari penalaran pikiran yang digunakan untuk mempertimbangkan berbagai alasan kuat suatu individu dalam menentukan baik/buruknya suatu tindakan.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Kohlberg sendiri bahwa bentuk kedewasaan moral tidak dapat ditentukan berdasarkan perilaku moral yang diamati oleh setiap individu dan pendapat orang lain tentang tindakan yang dilakukan, termasuk tindakan baik/buruk. Karena hal inilah yang membedakan seorang individu yang telah mencapai kedewasaan dan kedewasaan dalam sikap dan pemikiran, maka hanya dapat didasarkan pada kemampuan seorang individu untuk mempertimbangkan penalaran moral dengan memberikan berbagai penjelasan dan alasan yang masuk akal untuk menentukan baik/buruknya suatu tindakan yang dilakukan. .

Kohlberg 1969 menyatakan prinsip moral bukanlah standar untuk suatu aktivitas, namun pembenaran di balik suatu aktivitas. Konstruksi prinsip etika adalah kesetaraan dan kualitas yang mendalam pada dasarnya dianggap sebagai perselisihan mengenai apa yang hebat dari satu perspektif dan apa yang buruk di

sisi lain. Perjuangan adalah sesuatu yang patut disyukuri dari satu sudut pandang dan sesuatu yang mengerikan di sisi lain. Perselisihan adalah apa yang sedang terjadi yang harus diselesaikan antara dua kepentingan, khususnya kepentingan diri sendiri dan orang lain, atau antara kebebasan dan komitmen. Selanjutnya, kualitas etis adalah konsekuensi dari penimbangan antara dua bagian.

Pertimbangan moral seseorang terhadap sesuatu menurut (Kohlberg, 1969) tidak sama, tetapi berada dalam rangkaian yang beragam, tergantung pada tahap perkembangan kognitifnya. Pertimbangan moral yang dilakukan pada akhirnya akan menghasilkan penilaian moral, dan penilaian moral yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu tergantung dan menggambarkan tahapan perkembangan moralnya.

Teori perkembangan moral pertama kali di kemukakan oleh (Kohlberg, 1969) dan telah banyak digunakan dan memahami alasan yang dibuat seseorang saat membuat pertimbangan moral. Teori Kohlberg ini mencoba untuk menunjukkan proses penalaran yang digunakan individu, dan bagaimana proses itu berubah sebagaimana kematangan individu dari seorang anak menjadi seorang dewasa. Kohlberg mendefinisikan penalaran moral sebagai *judgment* tentang benar dan salah, pengembangan adalah tahap kematangan penalaran moral. Ia juga mendefinisikan tahap penalaran moral sebagai penalaran yang digunakan untuk mempertahankan posisi ketika dihadapkan pada dilema moral. Berdasarkan sudut pandang tersebut, Kohlberg berfikir bahwa hal tersebut adalah lebih penting dari pada pilihan actual yang dibuat, karena pilihan-pilihan yang dibuat seseorang tidak selalu jelas. Sebagaimana dijelaskan (Miller, 1982) bahwa ketika seseorang

dihadapkan pada suatu dilemma etika maka individu tersebut akan mempertimbangkannya secara kognitif dalam benaknya.

Perkembangan penalaran moral, sering disebut juga kesadaran moral, bukanlah standar untuk suatu aktivitas, namun merupakan pembenaran di balik suatu aktivitas. Desain utama etika adalah kesetaraan dan kualitas yang mendalam pada dasarnya dianggap sebagai perselisihan tentang apa yang hebat dari satu sudut pandang dan apa yang buruk di sisi lain. Perjuangan adalah sesuatu yang patut disyukuri dari satu sudut pandang dan sesuatu yang mengerikan di sisi lain. Perselisihan adalah apa yang terjadi yang harus diselesaikan antara dua kepentingan, khususnya kepentingan diri sendiri dan orang lain, atau antara hak dan komitmen. Akibatnya, kualitas etis adalah efek lanjutan dari penimbangan antara dua bagian tersebut (Morris & McDonald, 1995)

Teori (Kohlberg, 1969) berpandangan bahwa penalaran moral yang menjadi dasar perilaku etis, memiliki enam perkembangan yang dapat diidentifikasi. Kohlberg menggunakan cerita-cerita tentang dilemma moral dalam penelitiannya dan tertarik pada bagaimana orang-orang menjustifikasi tindakan-tindakan mereka pada saat mereka berada dalam personal moral yang sama. Selanjutnya Kohlberg mengkatagorikan dan mengklarifikasi responden yang dimunculkan kedalam enam tahap yang berbeda dimana tahap perkembangan moral tersebut menjadi ukuran tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Keenam tahap tersebut kemudian dibagi kedalam tiga tingkatan; pra-conventional, tingkatan conventional dan tingkatan *post-conventional*.

Individu pada tingkat terendah (*pre-conventional*), akan melakukan suatu tindakan karena takut terhadap hukum yang ada dan juga akan memandang kepentingan pribadinya sebagai hal yang utama dalam melakukan suatu tindakan. Pada tingkat kedua (*conventional*), individu akan mendasarkan tindakannya pada persetujuan teman-teman dan keluarga serta pada norma-norma masyarakat. Pada tingkatan yang paling tinggi (*post-convention*), individu akan mendasari tindakannya dengan memperhatikan kepentingan orang lain dan berdasarkan pada hukum-hukum universal.

Menurut (Welton et al., 1994) dalam setiap tahapan (*stage*) Kohlberg, individu memiliki pandangan sendiri mengenai hal yang benar menurut versinya. Individu dalam *stage 1* merasa hal yang benar adalah apa yang menjadi kepentingan individu itu tersebut. Individu *stage 2* menganggap hal yang benar adalah hasil dari pertukaran yangimbang, persetujuan maupun posisi tawar yangimbang. Individu dalam *stage 3* merasa hal yang benar adalah terkait dengan pengharapan akan kepercayaan, loyalitas, respek dari teman-teman dan keluarga. Individu dengan *stage 4* menganggap hal yang benar adalah dengan membuat kontribusi untuk masyarakat, kelompok atau institusi. Individu dalam *stage 5* dan *stage 6* menganggap hal yang benar adalah dengan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip etis, persamaan hak manusia dan harga diri sebagai seseorang makhluk hidup. Ringkasan mengenai tahapan moral model Kohlberg dipaparkan sebagai berikut:

a. Tingkat dan Tahapan Penalaran Moral

1. Pre-convention

Pada tingkat ini, individu mengenal moralitas berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, yakni menyenangkan/hadiah atau menyakitkan/hukuman dimana individu tidak melanggar aturan karena takut akan ancaman hukuman dari otoritas. Tahap/Stage dalam tingkatan ini adalah orientasi kepatuhan dan hukuman pemahaman individu tentang baik dan buruk ditentukan oleh otoritas sehingga kepatuhan terhadap aturan hanya untuk menghindari hukuman dari otoritas. Prioritas hedonistik-instrumental suatu perbuatan dinilai baik jika dapat berfungsi sebagai instrument untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan diri.

2. Conventional

Pada tingkatan ini, suatu perbuatan dinilai baik oleh individu karena mematuhi harapan otoritas atau kelompok sebayanya. Tahap/Stage dalam tingkatan ini adalah orientasi individu yang baik, tindakan berorientasi pada orang lain dimana suatu perbuatan dinilai baik apabila menyenangkan bagi orang lain. Orientasi keteraturan dan otoritas, perilaku dinilai baik jika menjalankan kewajiban, menghormati otoritas, dan memelihara ketertiban sosial.

3. Post-conventional

Pada tingkatan ini, aturan dan institusi dari masyarakat tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan diperlukan sebagai subjek sehingga individu pada tingkatan ini menaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal. Tahap/Stage dalam tingkatan ini adalah orientasi kontrol sosial-legalistik ada

semacam perjanjian antara dirinya dan lingkungan sosial sehingga perbuatan dinilai baik apabila sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. Orientasi kata hati yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kemampuan individu dalam menghadapi dilema etika (Welton et al., 1994) dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Menurut (Jazdzewski et al., 2009) mengatakan bahwa hasil dari berbagai penelitian bahwa level penalaran moral individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang cukup rendah akan berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang cukup tinggi ketika dihadapkan dengan dilemma etika. Semakin tinggi level penalaran seseorang maka individu tersebut mampu untuk hal yang benar.

Pada tahap paling tinggi (post-conventional), individu mendasari tindakannya dengan memperhatikan orang lain dan juga mendasarkan tindakannya pada prinsip-prinsip moral (Dewi, 2017). Individu aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, diharapkan mempunyai moralitas yang tinggi sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal dari pada kepentingan kelompok tertentu apalagi kepentingan individunya dan tentunya individu yang memiliki moralitas yang tinggi akan berusaha menghindari dari tindakan penyimpangan (fraud).

2.3.3 Fraud

Pengertian *fraud* adalah kecurang yang merupakan tindakan ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas hak atau kepemilikan orang lain. Didalam

kontes akuntansi, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji dalam laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) ialah kecurangan sebagai tindak penipuan tipu daya, kecurangan, mengelabui, dan cara tidak jujur lainnya. Hal tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas ataupun pihak lain.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) membagi fraud dalam tiga tipologi tindakan sebagai berikut:

a) **Korupsi (*Corruption*)**

Korupsi adalah demonstrasi penganiayaan kepercayaan yang datang dari orang-orang dan menyebabkannya dari beberapa kelompok, yang paling sulit untuk diidentifikasi mengingat fakta bahwa kekotoran batin biasanya tidak diselesaikan oleh hanya satu individu tetapi tuan rumah termasuk yang lain. kumpul-kumpul. Kolaborasi yang dimaksud bisa berupa penganiayaan kekuasaan, pembayaran, dll.

b) **Penyalahgunaan Asset (*Asset Misappropriation*)**

Merupakan suatu tindakan kecurangan akuntansi yang erat kaitannya dengan kegiatan penghilangan secara sengaja atau pencurian asset dalam suatu entitas. Penyalahgunaan asset pada umumnya dilakukan oleh pegawai yang memiliki strata atau tingkatan lebih rendah dalam suatu entitas, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan juga dapat dilakukan oleh manajemen puncak maupun orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam entitas yang bersangkutan.

c) Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*).

Merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya (salah saji laporan keuangan) untuk memperoleh keuntungan.

Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa pengertian dari fraud mengandung berupa penipuan, ketidakjujuran, dan niat. *Fraud* menyangkut cara-cara yang dihasilkan oleh akal manusia yang dipilih oleh individu untuk mendapatkan suatu keuntungan dari pihak lain dengan menyajikan yang palsu. *Fraud* dapat juga kejut, tipu daya, sampai cara licik dan tidak jujur yang digunakan untuk menipu orang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat (Singleton & Singleton, 2010) yang menyatakan bahwa *fraud, theft, defalcation, irregularities, whitecollar crime, dan embezzlement* merupakan istilah yang penggunaannya sering dapat dipertukarkan.

2.3.4 Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi merupakan padanan kata mampu, yaitu dapat melaksanakan pekerjaan atau jabatan yang dipercaya dapat memahami dengan baik, memiliki trampil dan lain-lain. Kemampuan sebagai keadaan yang harus ada dan dimiliki serta harus diketahui atau dilakukan oleh individu agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar. Kemampuan ini terdiri dari dua hal, yaitu pertama, kemampuan teknis atau fungsional dengan istilah lain *hard skill*. Kedua, kompetensi perilaku (*behavioural competencies*) atau juga dapat dikenal sebagai *soft skills*.

Kompetensi adalah individu yang mempunyai kompetensi akan bekerja dengan keterampilan dan pengetahuannya sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan mudah, cepat, dan pengalaman dibidang yang sesuai dengan pekerjaannya. Tiga kecenderungan ini juga sejalan dengan pengertian kompetensi. Penjelasan PP No. 101 Tahun 2000 menyatakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kompetensi aparatur serupa keterampilan, pengetahuan, dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan jabatannya. Selain itu individu yang bermpeten dapat ditinjau dengan seberapa baik individu tersebut dalam menjalankan pelatihan kerja supaya siap melayani kebutuhan pemangku kepentingan orang lain.

- a) Pengetahuan profesiaonal yang dibutuhkan,
- b) Keterampilan profesioanal, dan
- c) Nilai, etika, dan sikap professional.

Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan peran pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengacu pada lingkungan kerja. Untuk menunjukkan kompetensi sesuai peranannya, seseorang harus memiliki:

Sehingga kompetensi aparatur dapat didefinisikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang aparatur desa berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga aparatur tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesioanal, efektif dan efesien. Kompetensi merupakan variabel penentu dalam meningkatkan kualitaskerja. Sumber daya manusia tidak memiliki kemampuan

maka akan mengakibatkan ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah (Armelia & Wahyuni, 2020). Kompetensi terkait erat dengan ide tentang kapabilitas. Orang yang menyebut dirinya kompeten adalah orang yang memiliki kapasitas.

Aparatur pemerintahan yang berkualitas tentunya adalah tolak ukur yang dapat dijadikan patokan atau perbandingan agar bisa mengetahui sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya tolak ukur ini dapat dijadikan landasan dalam menentukan kualitas pribadi aparatur desa. Menurut (Fikri et al., 2015) menjelaskan indikator yang dapat dijelaskan untuk menilai kompetensi individu adalah sebagai berikut:

- a) Pengetahuan (*knowledge*)
- b) Keterampilan (*skill*)
- c) Sikap (*attitude*)

2.3.5 Sistem Pengendalian Interna

Menurut committee of sponsoring prganization (COSO) menyatakan bahwa pengendalian internal menjadi dorongan yang diberikan kepada seseorang atau karyawan dari bagian tertentu bagi organisasi secara keseluruhan agar berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditentukan.

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah rencana organisasi yang dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan personal lain dalam sebuah entitas yang bertujuan untuk memberikan dorongan kepada seseorang atau karyawan guna mencapai tujuan atau strategi perusahaan yang telah ditetapkan (Yadnya et al., 2017).

a. Tujuan Pengendalian Internal

Dari pengertian sistem pengendalian internal diatas, terdapat pula tujuan pengendalian internal itu sendiri yang menurut (Mulyadi et al., 2016), sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi kerja atau operasional perusahaan.
4. Mendorong di patuhinya kebijakan manajemen.

Menurut committee of sponsoring organization (COSO) 2013 pengendalian internal memiliki tiga katagori tujuan yaitu:

a. Tujuan Operasi

Tujuan ini berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk tujuan kinerja oprasional dan keuangan, serta menjaga asset terhadap kerugian.

b. Tujuan Pelaporan

Tujuan ini berkaitan dengan pelaporan keuangan dan non keuangan untuk internal maupun eksternal yang mencakup keandalan, ketepatan waktu, transaksi atau ketepatan lain yang ditetapkan oleh regulator, persyaratan yang diakui oleh pembuat standar, atau kebijakan entitas itu sendiri.

c. Tujuan Kepatuhan

Tujuan ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan di mana entitas tunduk.

2.3.5.1 Keterbatasan Pengendalian Internal

Berikut ini merupakan keterbatasan pengendalian internal menurut (Mulyadi et al., 2016), sebagai berikut:

- 1) Kesalahan dalam pertimbangan
- 2) Gangguan
- 3) Kolusi
- 4) Pengabaian oleh manajemen
- 5) Biaya lawan manfaat

Telah disebutkan bahwa salah satu komponen pengendalian internal merupakan tentang lingkungan pengendalian, dalam hal ini kemudian pemerintah sebagai pengelola negara merupakan manajemen sekaligus top leader bagi lembaga-lembaga pemerintah yang ada dibawahnya yang berwenang untuk menetapkan rambu-rambu serta aturan tentang pengendalian internal di lembagah pemerintahan, dan berdasarkan undang-undang nomor 01 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, maka dapat dilihat pada PP Tahun 2008 lahirlah apa yang dinamakan sistem pengendalian internal yang dijadikan sebagai acuan lembaga-lembaga pemerintah dalam pengelola keuangan yang bersumber dari Negara.

2.3.5.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Dalam suatu entitas atau organisasi diperlukan adanya suatu sistem pengendalian internal. menurut (Dwi Rahayu, Anim Rahmayati, 2017) sistem pengendalian ini sangat penting dalam melakukan kegiatan oprasional pemerintah, karena dengan adanya sistem pengendalian internal maka kecurangan yang

mungkin dilakukan oleh pegawai dapat di minimalisir. Oleh karena itu setiap entitas pemerintah membuat dan menjelaskan sistem pengendalian internal demi kelancaran dan kemajuan organisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa : “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.” Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas 5 unsur sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian.

Adalah kondisi di instansi tempat bekerja dengan membangun kesadaran semua personil mengenai pentingnya pengendalian suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas menjadi tanggung jawab sehingga meningkatkan efektifitas pengendalian intern.

2. Penilaian risiko

Kegiatan penilaian kemungkinan terjadi situasi yang mengancam pencapaian dengan tujuan sasaran instansi pemerintah mencakup kegiatan

identifikasi, analisis, dan mengelola resiko yang relevan bagi proses atau kegiatan organisasi.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan juga penetapan serta pelaksanaan kebijakan maupun prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko dapat diatasi secara efektif.

4. Informasi dan komunikasi

Data yang telah diolah yang dapat untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas sehingga komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dengan menggunakan symbol atau lembaga tertentu.

5. Pemantauan pengendalian internal.

Proses penilaian atas mutu kinerja bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindak lanjuti. (PP, 2008)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan keyakinan atau jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisiensi, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan peraturan perundang-undangan sebagai tujuan organisasi pemerintah dapat tercapai dan kerugian atau kemungkinan ancaman keamanan dalam informasi dapat dikurang.

2.3.5.3 Tujuan Sistem Pengendalian Interanal

Menurut peraturan pemerintah no 60 tahun 2008 tujuan sistem pengendalian internal pemerintah adalah memberikan keyakinan yang memadai tentang:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien
2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan
3. Pengamanan asset Negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakannya dengan baik dan benar, SPIP akan memberikan jaminan di mana seluruh penyelenggaraan Negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Untuk mencapai tujuan SPIP dimaksud ODP yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Akibat dari tujuan SPIP akan memberikan manfaat yaitu mendeteksi kesalahan dan fraud dalam pelaksanaan aktivitas organisasi dengan membantu pengamanan asset terkait dengan kemungkinanterjadinya kecurangan, pemborosan dan salah penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi.

2.3.5.4 Indikator Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan

Kerangka pengendalian internal yang diterima di sebagian besar lingkup Amerika Serikat adalah kerangka pengendalian internal COSO yang memiliki lima komponen kerangka pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta

pemantauan (Huda et al., 2018). Kerangka pengendalian internal COSO tertuang dalam PP Nomor 60 tahun 2008 yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*environment control*)

Merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap pimpinan instansi atau lembaga tentang pengendalian internal yang dapat menimbulkan kesadaran seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian bagi instansi ataupun lembaga yang bersangkutan melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika,
- b. Komitmen terhadap kompetensi,
- c. Kepemimpinan yang konduktif,
- d. Pembentuk struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan,
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat,
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan SDM,
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif,
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah.

2. Penilaian Resiko (*risk valuation*)

Hal pertama yang dikaitkan dengan pengendalian internal adalah melihat kesesuaian tujuan latihan yang dilakukan dengan tujuan sasaran, serta kesesuaian dengan sasaran utama yang diungkapkan. Setelah penetapan tujuan dilakukan, tahap selanjutnya adalah membedakan peluang dalam dan luar yang dapat mempengaruhi pencapaian pencapaian tujuan tersebut, kemudian pada saat itu,

membedah bahaya yang mungkin terjadi dan akibat yang mungkin muncul. mulai dari yang paling penting hingga yang paling umum aman.

3. Kegiatan Pengendalian (*activity control*)

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta menetapkan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan PP No 60 tahun 2008 kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dapat berupa:

- a. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan,
- b. Pembinaan sumber daya manusia,
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi,
- d. Pengendalian fisik atau asset,
- e. Penetapan dan review atas indicator dan ukuran kinerja,
- f. Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting ,
- g. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian,
- h. Pembatasan akses atas sumberdaya dan pencatatannya,
- i. Akuntabilitas terhadap sumberdaya dan pencatatannya,
- j. Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*)

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan (monitoring)

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindak lanjuti.

2.3.6 Moralitas Individu

Moralitas mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan moral. Moral diartikan sebagai perubahan dari segi baik dan buruknya (Manafe, 2015).. Moralitas individu adalah kemampuan memahami hal yang benar dan yang salah, yaitu memiliki keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga rang bersikap benar dan terhormat . adanya faktor keinginan memiliki dan kebutuhan yang berhubungan dengan individu sebagai pelaku kecurangan atau sebagai individual.

Menurut, (Satriawan S. et al., 2016) menyatakan moralitas merupakan kualitas mengenai baik buruknya perilaku seseorang. Seseorang tidak bermoral cenderung akan bertindak untuk melakukan kecurangan yang akan merugikan orang lain. Penelitian (Ariani et al., 2014) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan akuntansi. Artinya, semakin tinggi moralitas individu yang dimiliki pegawai maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin menurun.

Moralitas individu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*). Organisasi ataupun instansi juga memiliki tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral dari manajemen organisasi mempengaruhi terjadinya perilaku tidak etis. Semakin buruk moralitas dari individu maka kemungkinan tindakan tidak etis dan kecenderungan kecurangan

(*fraud*) akan semakin besar pula. Moral yang buruk dari individu diasumsikan dapat mendorong individu bertindak tidak etis dan berlaku curang dalam akuntansi.

2.4 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hopotesis

2.4.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan *Fraud*

Kompetensi (Klara Wonar, Dr. Syaikhul Falah, 2018) yang menyatakan bahwa, kemampuan yang dimiliki oleh pegawai aparatur desa merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk keberhasilan tanggung jawab yang diemban. Kemampuan dasar yang sebaiknya dimiliki oleh aparatur desa yaitu, paham betul mengenai peraturan hukum yang berlaku di desa, memahami tugas fungsi dan tanggung jawabnya sebagai aparatur desa dan mempunyai pengetahuan yang memadai tentang sistem pengendalian yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kompetensi aparatur sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan dan alokasi dana desa untuk mencegah kemungkinan terjadinya peluang adanya *fraud* dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Klara Wonar, Dr. Syaikhul Falah, 2018) juga menyatakan bahwa, Kemampuan aparatur desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan ekonomi desa, sosial, budaya dan bidang lainnya.

Menurut (Sulistyorini & Urumsah, 2021) menyatakan pada saat merekrut pegawai pada perusahaan ataupun organisasi sangat penting untuk melakukan proses mengevaluasi tingkat kepercayaan dan kompetensi para karyawan sebagai salah satu faktor penguat budaya anti *fraud* dalam program pencegahan *fraud*.

Kompetensi aparatur dibidang pengelolaan keuangan akan lebih berpotensi melakukan terjadinya pecegahan kecurangan keuangan sehingga tidak merugikan masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan (Indrapraja et al., 2021), (Romadaniati, Taufeni Taufik, 2020), (Faridatul, 2020), (Wahyuni & Nova, 2019), (Basiruddin, 2012) dan (Marwah Yusuf, aswar, 2018) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, dimana semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa maka akan semakin tinggi juga tingkat pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Tetapi hasil penelitian tersebut tidak selaras dengan (Huda et al., 2018) menjelaskan bahwa yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi, sehingga berpotensi terjadinya *fraud*. Hal ini juga diperparah oleh masyarakat yang kurang kesadaran terhadap kebijakan pemerintahan desa.

H1: Kompetensi aparatur berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Dalam *Fraud triangle theory* dinyatakan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya *fraud* adalah *opportunity* (peluang/kesempatan). Peluang tersebut dapat dikurangi dengan sistem pengendalian internal. Kelemahan atau tidak adanya sistem pengendalian internal memberikan kesempatan bagi pelaku fraud melakukan kejahatannya. Menurut (Sawyer & Sawyer, 2005) menyatakan bahwa fungsi dari sistem pengendalian internal dapat mencegah dan mendeteksi hal-hal kecurangan (*fraud*).

Sistem pengendalian internal merupakan sebuah organisasi ataupun instansi yang tidak hanya mencakup kegiatan akuntansi saja tetapi segala aspek kegiatan organisasi yang lain. Pada umumnya pencegahan *fraud* yaitu aktivitas yang dilaksanakan terkait dengan penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu terjadinya tindakan yang diperlukan telah dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain dalam organisasi untuk dapat menimbulkan keyakinan dalam mencapai tujuan.

Hasil penelitian dari (Nisak et al., 2013) (Pramesti et al., 2020) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbaikan sistem pengendalian internal menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pencegahan *fraud*.

Sedangkan berbeda dengan penelitian dari (Faridatul, 2020), (Luh Ayu Marsita Dewi, 2019), dan (Dwi Rahayu, Anim Rahmayati, 2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Berarti pencegahan kecurangan tidak mempengaruhi sistem pengendalian internal karena pengendalian yang tinggi dapat menimbulkan terjadinya kompleksitas yang tinggi sehingga terjadinya tekanan terhadap pegawai.

H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

2.4.3 Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud*.

Moralitas mengacu pada nilai-nilai pribadi atau budaya, kode etik atau adat istiadat sosial yang membedakan antara benar dan salah, sehingga moralitas pada seorang aparat sangat berperan penting sebagai pemegang komitmen

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan konstitusi, berpihak kepada kepentingan rakyat, transparan, akuntabel dan tidak korup (Artana, 2012). Moralitas Individu adalah moral yang sesuai dengan aturan yang mengatur hukum sosial atau adat atau perilaku (Saputra dkk., 2015). Moralitas manusia dalam menjalankan perilakunya terbagi kedalam beberapa tingkatan. Moralitas individu yang tinggi maka akan meminimalisir kecurangan akuntansi yang berada ditingkat daerah maupun pusat. Hal ini dorong oleh kepatuhan individu terhadap aturan yang dimiliki oleh suatu organisasi.

Teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg (1971) mempunyai pandangan bahwa penalaran moral merupakan landasan perilaku etis. Terdapat tiga tahapan dalam perkembangan moral seseorang. Tahapan pertama (pre-conventional) yaitu tahapan yang paling rendah, individu cenderung bertindak karena tunduk dan takut pada hukum. Serta pada level ini individu menanggapi bahwa kepentingan pribadi lebih penting. Hubungan dengan teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg (1971) maka individu dengan tingkat penalaran yang tinggi akan mematuhi peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi untuk menciptakan suasana yang kondusif. Kepatuhan menjadi salah satu indikator untuk memenuhi apakah seorang memiliki penalaran moral yang tinggi. Hal tersebut akan membantu dalam penyelesaian dilema etika yang dihadapi.

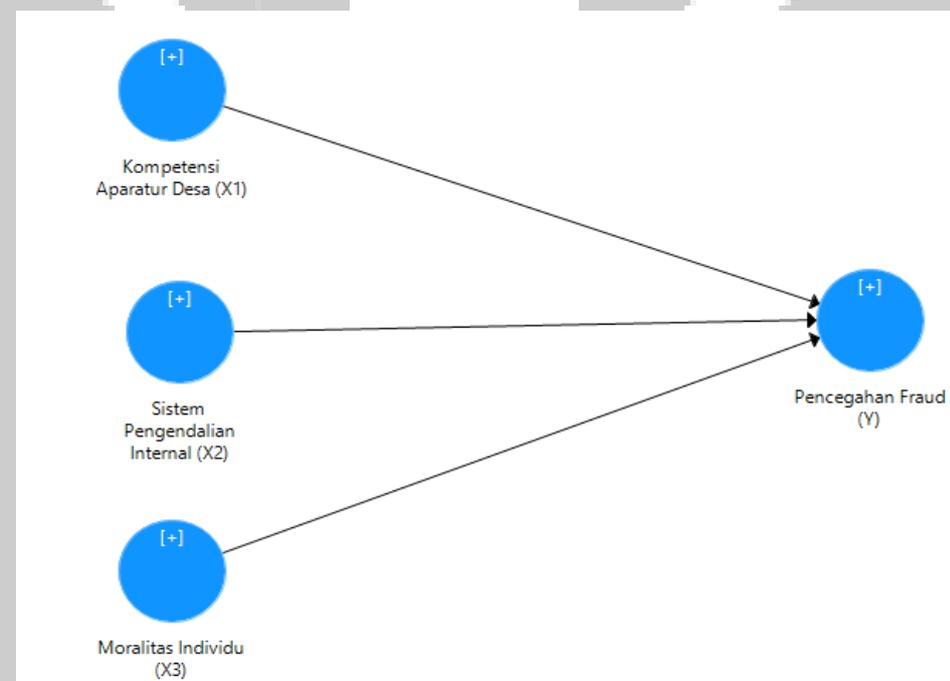
Klara Wonar, Dr. Syaikhul Falah., 2018 menyatakan bahwasanya moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Puspasari dan Suwardi, (2016) dalam penelitian yang dilakukan pemerintah

daerah menemukan bahwasanya moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hal ini mengisyaratkan bahwasanya semakin tinggi level penalaran moral seseorang maka kemungkinan melakukan tindakan kecurangan semakin kecil.

H3: Moralitas individu berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hipotesis yang telah dijabarkan diatas maka kerangka pemikiran yang dapat digambarkan ialah:



Sumber: Data Diolah

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran